

## TOPIK UTAMA

### ANALISIS SEMIOTIKA DALAM PRESS RELEASE (REKOMENDASI KASN ATAS PEROMBAKAN PEJABAT DKI JAKARTA)

**Rully Viersa Budiman, Sekar Puspita, Whitney Kenny Pangkey**  
**Program Studi Bisnis Komunikasi London School of Public Relation**  
**e-mail: rullyviersa@gmail.com**

#### ABSTRAK

*Press release adalah informasi yang dibuat dan disusun oleh Humas di suatu industri, organisasi ataupun lembaga dengan tujuan memberikan informasi kepada publik melalui media massa/surat kabar baik online maupun offline. Hal ini menjadikan press release sebagai suatu media dalam penyampaian informasi oleh suatu badan tertentu. Pada pelaksanaan kinerja lembaga pemerintah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam mengawasi pelaksanaan penugasan dan pencabutan pejabat DKI Jakarta, KASN mengeluarkan press release terkait beberapa catatan dan rekomendasi hasil evaluasi yang menimbulkan konotasi bahwa KASN telah berpolitik. Pada sisi lain Pemerintah DKI menganggap press release adalah cara yang tidak tepat untuk menyampaikan informasi tersebut. Untuk melihat bagaimana signifikansi KASN dalam memanfaatkan press release, penelitian dilakukan menggunakan Model Analisis Semiotika Roland Barthes dalam menggali fenomena ini. Studi menemukan adanya ketidaksesuaian pada konotasi yang berkembang bahwa KASN dianggap telah berpolitik.*

Kata kunci: *press release*, KASN, DKI Jakarta, semiotika

#### PENDAHULUAN

Pada tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetahui bahwa KASN melakukan siaran pers terkait hasil penyidikan dugaan pelanggaran pada Pilkada DKI Jakarta. Ia juga menyebutkan bahwa memo intern dan menunggu Pemprov DKI secara teknis dimungkinkan antar pemerintah. Jadi pada dasarnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan langkah non-administrasi. Lebih lanjut, Anies Baswedan akan tetap menyikapinya secara profesional dan tidak politis (*Anies: Kenapa KASN Harus*

*“Press Release”? Kan Bukan Partai, Bukan Ormas, n.d.*).

Konflik memuncak ketika Sofian Effendi selaku ketua KASN menanggapi dan menyebut organisasi mereka adalah lembaga pemerintah dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN dibuat dari partai non politik yang harus dipenuhi untuk dapat terpilih menjadi anggota. Dia juga menambahkan, siaran pers investigasi itu diterbitkan untuk mendapatkan perhatian Gubernur DKI sementara surat-surat internal mereka diabaikan. Sofian Effendi menjelaskan bahwa dengan metode press release akan

Rully Viersa Budiman, Sekar Puspita,  
Whitney Kenny Pangkey

menjadi solusi yang lebih baik untuk mendapatkan tanggapan dan Gubernur DKI yang berpolitik bukan pihak KASN seperti yang dituduhkan Anies (*Ketua KASN: Pak Gubernur Bilang Dia Profesional Dan Saya Politis, Bukannya Terbalik?*, n.d.)

Kewenangan resmi KASN sebagaimana UU No 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa KASN harus memiliki independensi dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan itu sendiri untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dengan praktik etika mendasar dalam kepegawaian (Wajong, 2019).

Anies: Kenapa KASN Harus "Press Release"? Kan Bukan Partai, Bukan Ormas [kom.ps/AFy80a](https://t.co/AFy80a) ini @aniesbaswedan anti transparasi ya? Apalagi kasus ini menyita publik, & publik berhak tahu, bukannya menjalankan rekomendasi KASN eh malah menyerang...

Translate Tweet



Gambar 1: Protes Anies terhadap KASN (Mohamad Guntur Romli - @aniesbaswedan *Anti Transparansi Anies: Kenapa KASN Harus "Press Release"? Kan Bukan Partai, Bukan Ormas [Https://T.Co/2qu0vORSwy](https://t.co/2qu0vORSwy) Ini @aniesbaswedan Anti Transparasi Ya? Apalagi Kasus Ini Menyita Publik, & Publik Berhak Tahu, Bukannya*, n.d.)

Komunikasi antara Gubernur DKI dan Ketua KASN semakin buruk. Kedua belah pihak mengungkapkan perbedaan pandangan dalam penurunan pangkat dan mutasi PNS DKI Jakarta. Sofian mengatakan, permintaan KASN untuk memberikan bukti pemeriksaan di beberapa PNS yang diberhentikan dan menjadi pegawai bukanlah hal baru. Kasus yang sama juga dialami mantan Gubernur DKI Jakarta yang dipimpin Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia juga menjelaskan, saat Basuki atau Ahok melakukan mutasi pegawai dalam struktur organisasinya, PNS yang diberhentikan disertai dengan proses pembuktian pemeriksaan dan telah diperiksa secara menyeluruh. Dalam hal ini, Gubernur DKI Anies hanya menanggapi surat permintaan bukti pemeriksaan dengan hanya menunjukkan dengan mengirimkan beberapa lembar dari Media Surat Kabar. Itu tidak seharusnya menjadi bukti inspeksi seperti yang dipersyaratkan (*Saling Tudung Anies Dan Ketua KASN - News Liputan6.Com*, n.d.).

KASN menerima pengaduan keberatan dari beberapa pihak terkait keputusan tersebut. Jadi mereka menyelidiki lebih lanjut dan bertemu dengan Anies. Kemudian memanggil Sekda DKI dan meminta hasil evaluasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk mendapatkan data yang lengkap dan berimbang terkait beberapa Walikota, Bupati,

Ketua RSUD, dan Kepala SKPD di wilayah DKI Jakarta. Melalui siaran pers 27 Juli 2018, Ketua KASN Sofian effendi menyebutkan tentang dampak Keputusan Gubernur DKI Nomor 1000 Tahun 2018 (8 Juni 2018) dan Nomor 1036 Tahun 2018 (5 Juli 2018), berdampak pada pensiunnya 16 orang dalam jabatan pimpinan utama dan digantikan oleh pejabat baru. Akibatnya, terjadi pelanggaran prosedur dan perundang-undangan yang berlaku terhadap pemberhentian dan mutasi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, KASN memberikan empat rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Anies Baswedan segera mengembalikan para Pejabat Pimpinan Tinggi yang diberhentikan dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusam Gubernur DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 tersebut tersebut ke jabatan semula.
2. Terdapat bukti-bukti yang memperkuat adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut, diharapkan dalam waktu kurang dari 30 hari kerja, bukti baru itu dapat disampaikan ke KASN
3. Penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah 1 (satu) tahun dalam suatu jabatan dan diberikan kesempatan

selama 6 (enam) bulan kepada pejabat bersangkutan untuk memperbaiki kinerja

4. Evaluasi penilaian hasil kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk Berita Acara Penilaian (Sendhikasari, 2018)

## TINJAUAN PUSTAKA

### Semiotika

Daniel Chandler menyebut semiotika sebagai ilmu mengenai tanda-tanda. Paul Colbey menjelaskan semiotika berasal dari kata dasar seme yang berarti “penafsir tanda”. Semiotika juga dapat disebutkan sebagai studi tentang bagaimana makna dan nilai dalam sebuah komunikasi diproduksi (Dadan, 2005). Selaku filsuf, semiolog, dan kritikus sastra dari Prancis, Roland Barthes mengembangkan *semiology* menjadi cara dalam menganalisis kebudayaan dengan memperhatikan signifikansi dari tiga hal penting dalam analisisnya, makna denotasi, konotatif dan mitos. Pada konsep yang Barthes berikan, tanda konotatif bermaksud tidak hanya mempunyai makna tambahan, namun juga memiliki kedua bagian tanda denotative yang melandasi keberadaannya (Danesi, 2010). Konotasi tidak terlepas dari denotasi. Penanda dan pertanda dalam konotasi berangkat dari denotasi (Barthes, 1967).

Salah satu hasilnya, Anies mengevaluasi kembali beberapa jabatan pimpinan utama yang diturunkan ke level staf. Selain itu ia juga mengembalikan Faisal Syafrudin menjadi Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) karena KASN menilai pangkatnya belum mencukupi dan menunggu kenaikan pangkat pada Oktober 2018 mendatang.

### **Analisis SWOT**

Pada penentuan manajemen strategi untuk membentuk tujuan dan mencapainya, beberapa aspek perlu dipertimbangkan dan di analisis lebih jauh. Analisis SWOT-PESTLE digunakan sebagai alat untuk mengorganisir suatu kondisi dan menemukan langkah yang tepat. PESTLE merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan *environment* (lingkungan) dimana analisis pada masing-masing aspek tersebut turut membantu dalam analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan yang mungkin terjadi pada suatu peristiwa yang dianalisis (*SWOT & PESTLE Analysis | LinkedIn*. n.d.).

### **METODE PENGKAJIAN**

Komunikasi merupakan suatu proses yang menggunakan tanda dan symbol sehingga memberikan makna bagi kelompok tertentu. (Sarbaugh, 1993) Berasal dari Yunani,

seemion yang bermakna “tanda”, dalam pemahaman peristiwa *press release* KASN dengan konotasi yang berkembang bahwa mereka memiliki tujuan berpolitik akan dikonfirmasi dengan analisis lebih lanjut. Pada hal ini dilakukan pemahaman keseluruhan yang digali dari segi aspek sudut pandang KASN, analisis SWOT-PESTLE dilakukan untuk melihat berbagai sudut pandang terkait peristiwa ini dan dilanjutkan dengan analisis diagram *Fishbone* untuk dapat menggali lebih dalam akan motif diterbitkannya *press release* tersebut. Secara rinci dimulai dengan analisis PESTLE sebagai berikut:

1. *Political Analysis*: dalam urusan organisasi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki wewenang dan peran yang sudah jelas: menjaga netralitas pegawai ASN, memonitor perkembangan karir, melaporkan dan mengevaluasi peraturan manajemen kepada presiden, memantau setiap tahapan pengisian jabatan tingkat tinggi mulai dari pembuatan pengumuman lowongan, proses seleksi, penetapan dan pengukuhan jabatan tingkat tinggi (Wajong, 2019).

Meskipun demikian memberikan Saat ini, KASN telah diusulkan untuk dibubarkan oleh Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syamsurizal. Ia juga menyebutkan

kewenangan KASN tumpang tindih dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN). Jika tidak, MenPAN menanggapi bahwa KASN diperlukan sebagai organisasi pemantau independen dan usulan ini akan dipelajari lebih lanjut dan membentuk kru khusus dalam membuat rancangan undang-undang. Dengan demikian dalam optimalisasi merit system manajemen ASN lebih baik penguatan peran dan fungsinya (*Pembubaran KASN: Serangan Balik Dari Calo Jual Beli Jabatan?*, n.d.)

2. *Economical Analysis*: dalam rekomendasi rilis KASN dengan press release tidak berdampak langsung pada aspek perekonomian Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dengan benar, organisasi ini dapat memantau pemimpin PNS yang tepat dan cakap artinya ada kemampuan yang benar yang diperlukan pada fungsi utama. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat berfungsi dengan baik dan efisien.

Melihat pencapaian kementerian BUMN dari evaluasi meritokrasi KASN, memberikan kesan positif yang berarti KASN telah mengolah talenta yang mumpuni dan sesuai untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Penghargaan

tersebut, membuat Kementerian BUMN mendapatkan nilai tertinggi dalam penilaian kinerja bersama Kementerian Keuangan. (*Peroleh Nilai Tertinggi Sistem Meritokrasi KASN, Transformasi Di Kementerian BUMN Berhasil - Ekonomi Bisnis.Com*, n.d.)

Evaluasi kinerja KASN kepada Kementerian Keuangan memberikan kategori IV melalui KASN No. 2/KEP.KASN/C/I/2020 terkait penerapan meritokrasi pada kementerian bidang ekonomi. Dalam beberapa aspek, evaluasi yang dilakukan melalui pemantauan teknologi independen mempertimbangkan 8 faktor sebagai berikut:

- i. Perencanaan Kebutuhan
- ii. Pengadaan
- iii. Pengembangan karir
- iv. Promosi dan mutasi
- v. Manajemen kinerja
- vi. Penggajian, penghargaan, dan disiplin
- vii. Perlindungan dan pelayanan Sistem Informasi

Itu juga bisa menjadi pendorong bagi kementerian lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam menerapkan meritokrasi sebagai prinsip dasar melalui organisasi (*Kemenko Perekonomian Raih Penghargaan Sistem Merit ASN Dari KASN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, n.d.).

3. *Social Analysis*: pada aspek sosial, pemberitaan ini dapat mempengaruhi citra KASN bahwa sebagian masyarakat dapat berpikir positif tentang KASN yang telah melakukan tugas pengawasannya dengan baik tetapi di sisi lain masyarakat dapat berpikir mungkin ada kepentingan politik melalui siaran pers tersebut.
4. *Technology Analysis*: pada aspek teknologi hanya digunakan sebagai media komunikasi antara KASN dengan Gubernur DKI Jakarta. Tidak ada hubungan yang signifikan melalui kasus ini pada aspek teknologi.
5. *Law Analysis*: KASN telah menjalankan kewenangan pengawasannya terhadap proses Kepegawaian sebagaimana UU ASN pasal 33 yang menyebutkan tentang berdasarkan hasil pemantauan yang tidak ditindaklanjuti, KASN dapat merekomendasikan Presiden untuk menghukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan instansi terkait yang melanggar prinsip kepastian dan peraturan yang berlaku. Sebelumnya, jika Gubernur DKI Jakarta tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut maka dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 78 juncto pasal 61, pasal 67, dan pasal 76 (Sendhikasari,

2018).

KASN telah diketahui memiliki kewenangan dan perannya adalah:

- I. Menjaga netralitas aparat ASN, memantau pembinaan profesi, melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen kepada presiden
- II. Memantau setiap tahapan pengisian jabatan tingkat tinggi mulai dari pembuatan pengumuman lowongan, proses seleksi, penetapan dan pengukuhan jabatan tingkat tinggi (Wajong, 2019).

Kejadian ini telah dilakukan dalam pelaksanaan pemantauan PNS rotasi, penurunan pangkat atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Seperti pada tahun ini Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah mengembalikan beberapa jabatan pimpinan utama yang diturunkan berdasarkan rekomendasi KASN. Prinsip utamanya adalah “right men on the right place” artinya setiap tingkatan harus diisi oleh pejabat yang memenuhi syarat dan kompeten (*Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN, Gubernur Babel Lantik Pejabat Yang Sempat Didemosi*, n.d.).

Selanjutnya kegiatan *monitoring* sebagai fungsi manajemen bertujuan untuk mengecek tingkat pencapaian dan kegagalan

dalam satu proses setelah direncanakan dan dilaksanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan sejak dini untuk mendapatkan umpan balik jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran sebelum menjadi sesuatu yang merugikan organisasi dan kepentingan masyarakat. (Bakry, 2009)

Jadi, dalam aspek hukum hal ini menjadi peluang bagi KASN jika ingin menanggapi Gubernur DKI Jakarta yang menuduh mereka berpolitik karena KASN memiliki kewenangan yang taat hukum dan KASN hanya menjalankan tugasnya dengan tegas.

6. *Environment Analysis*: Melalui kasus, aspek ini tidak relevan dengan aspek lingkungan atau alam karena organisasi ini lebih berat pada wilayah politik.

Setelah melihat analisis PESTLE maka dapat membantu melakukan analisis SWOT sebagai berikut:

1. *Strength*: secara kekuatan KASN telah membuktikan dalam melaksanakan tugas dengan baik dan menjelaskan melalui media bahwa mereka telah mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta Anies tentang pelanggaran namun tidak ditanggapi
2. *Weakness*: saat KASN memilih untuk mempublikasikan press release sebagai cara untuk menyampaikan tugas mereka

yang dapat mengurangi impresi KASN sebagai pengawas yang bersifat netral dalam memberikan penilaian terhadap calon pejabat

3. *Opportunities*: KASN memiliki peluang dalam jangka panjang untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dalam melaksanakan tugas organisasi secara mandiri sehingga dapat membangun dan meningkatkan integritas pemerintahan
4. *Threats*: Ada beberapa aspek yang menjadi ancaman bagi KASN dalam masalah ini seperti aspek Politik, dan aspek sosial dapat menjadi bumerang bagi KASN. Orang-orang dengan kepentingan politik akan berusaha mencari kelemahan terutama orang-orang yang haus kekuasaan politik.

Sehingga, ringkasan analisis SWOT-PESTLE ialah sebagai berikut:

|          |               | Positive  | Negative   |   |
|----------|---------------|---|------------|---|
| Internal | Strengths     | KASN terbukti melaksanakan tugas pengawasan dengan baik dan telah menjelaskan pada media bahwa surat sebelumnya sudah dilayangkan namun diabaikan | Weaknesses | Langkah KASN yang tegas dalam mempublikasikan <i>press release</i> terkait pelanggaran tersebut memungkinkan disalah artikan oleh persepsi masyarakat seperti yang dituduhkan |
|          | Opportunities | KASN memiliki kesempatan untuk membangun Indonesia lebih baik lagi dengan melaksanakan tugasnya dengan benar pada jangka panjang                  | Threats    | Pada aspek politik dansosial dapat menjadi ancaman bagi KASN dikarenakan kepentingan politik akan sangat kental dalam konflik pelaksanaan tugas KASN                          |
| External |               |   |            |   |

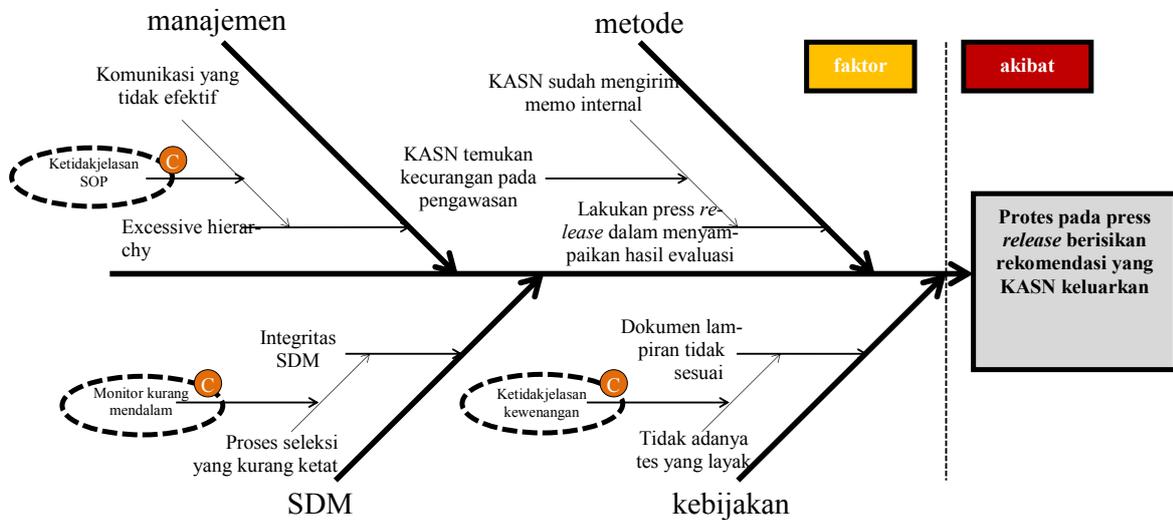
  

| ANALYSIS SUMMARY   |  |
|--|--|
| KASN perlu lebih berhati-hati dalam mengambil langkah respon pada pelaksanaan tugas, karena konflik kepentingan politik mampu menjadikan alasan untuk KASN diserang oleh pihak tertentu. |  |

Gambar 2: Ringkasan Analisis SWOT-PESTLE

Maka kemudian dapat dilihat bahwa beberapa poin kekuatan KASN adalah mereka melakukan tugas dengan benar dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan organisasi pemerintahan Indonesia secara mandiri dengan otoritas hukum yang kuat. Di sisi lain terlihat kelemahan mereka yang telah melakukan *release* dan mempertaruhkan citra KASN melalui persepsi masyarakat di media yang dapat menjadi ancaman bagi organisasi mereka.

Identifikasi akar masalah



Gambar 3. Diagram Fishbone

Gambar 3 di atas menjelaskan penyebab dan mencerminkan beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Dalam empat aspek penting dari kontroversi ini hal yang dievaluasi lebih jauh dari seperti:

- I. Metode : bagaimana cara KASN menyampaikan pesannya?
- II. Manajemen: bagaimana organisasi internal KASN?
- III. People : Seberapa baik KASN dalam mengelola dan melaksanakan tugas?
- IV. Kebijakan : sejauh mana kewenangan KASN dapat mengintervensi pemerintah?

Seperti empat faktor yang dianalisis, hanya 3 akar penyebab ditemukan yang dapat dievaluasi melalui kontroversi ini. Aspek metode telah menggali alur dalam cara KASN

berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta. Jelas Anies, pihak Gubernur DKI Jakarta keberatan dan keberatan atas tindakan KASN mengeluarkan poin rekomendasi tersebut namun (seperti pada diagram alur analisis) hal itu dilakukan karena KASN menemukan kecurangan pada Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penurunan pangkat dan mutasi. Berdasarkan tugas KASN dalam proses investigasi diharapkan lebih objektif.

Dalam aspek Kebijakan, KASN harus memiliki batasan kewenangan yang jelas untuk mendukung tugasnya dalam eksekusi tugas. Kuatnya hukum dan bukti-bukti dalam kewenangan KASN harus dievaluasi lebih mendalam karena dalam kontroversi ini terlihat

bahwa evaluasi pada hasil akhir kerja pemerintah akan jauh lebih berat daripada jika KASN sudah memantau pada setiap langkah evaluasi. Strategi yang dapat dilakukan dalam menanggapi protes pemerintah DKI:

- a. Manajemen dan kebijakan (jangka pendek)  
mengumpulkan SOP dan wewenang yang jelas dalam mengevaluasi, memantau, dan berkomunikasi dengan organisasi pemerintah. Mengungkapkan secara mendalam kewenangan tersebut dapat membuat pelaksanaannya kepada pemerintah untuk meminimalisir pertentangan.. KASN perlu menerbitkan SOP mereka dengan tegas dan terperinci. Hal ini dapat memberikan dua hal yang bermanfaat yaitu pertama, KASN akan memiliki citra positif yang berdampak pada respek masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui bagaimana KASN memantau dan melakukan pekerjaan dengan benar. Kedua, ini bisa menjadi serangan “halus” kepada Anies selaku Gubernur DKI Jakarta bahwa sebenarnya ini adalah bukti bahwa KASN sudah menjalankan perannya dengan benar tetapi pemerintah hanya kurang kooperatif dan tidak transparan.
- b. SDM (jangka menengah ke jangka panjang)

KASN jelas memiliki tugas untuk berurusan dengan pemerintah yang berisiko tinggi kepentingan politik dan dapat melakukan keputusan yang mengarah pada ketidakjujuran, nepotisme dan membawa upaya lebih bagi KASN. Alih-alih melakukan pemantauan pada hasil akhir dan menemukan kecurangan, hal ini akan lebih baik jika adanya *monitoring* sejak awal. Taktik untuk strategi . KASN perlu meningkatkan tingkat pemantauan mereka ke langkah-langkah penilaian yang lebih detil dan spesifik. Mulai dari pertimbangan calon, pemeriksaan latar belakang dan juga pelaksanaan penilaian. Setelah semua kewenangan ditetapkan, hal ini juga harus diumumkan untuk menghindari protes kembali.

## **KESIMPULAN**

Adanya ketidaksesuaian konotasi yang berkembang pada KASN atas tuduhan berpolitik oleh Pemerintah DKI. Hal ini dapat tercermin dari analisis mendalam melalui metode SWOT-PESTLE dan diagram *fishbone* bahwa KASN sudah berupaya melakukan tugasnya sesuai kewenangan yang ada.

Adapun rekomendasi kepada KASN yang terutama perlu untuk dilakukan ialah memperbaiki hubungan dengan pemerintah

DKI Jakarta demi kelancaran *monitoring* pada masa yang akan datang melalui diskusi dan pembicaraan lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anies: Kenapa KASN Harus “Press Release”? Kan Bukan Partai, Bukan Ormas.* (n.d.). Retrieved October 10, 2021, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/28/14265901/anies-kenapa-kasn-harus-press-release-kan-bukan-partai-bukan-ormas>
- Anies Baswedan: Kok jadi Ketua KASN berpolitik? | merdeka.com.* (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from <https://www.merdeka.com/jakarta/anies-baswedan-kok-jadi-ketua-kasn-berpolitik.html>
- Bakry, A. R. M. La. (2009). *Pemerintahan Daerah di Indonesia.*
- Barthes, R. (1972). *Mythologies: Roland Barthes.* New York: Hill and Wang.
- Dadan, R. (2005). *Tokoh dan Pemikiran Semiotika.* Jakarta: Tazkiya Press.
- Danesi, M. (2010). *Pengantar Memahami Semiotika Media.* Yogyakarta: Jalansutra.
- Fatimah, S. (2019). *Efektifitas Press Release Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Terhadap Pembentukan Citra Pemerintahan di Kalangan Wartawan.*
- Fiske, J. (2011). *Introduction to communication studies (3rd Edition).* New York, NY: Routledge.
- Juran, J. M. (1999). *Juran's Quality Handbook (5th Edition).* McGraw-Hill.
- Kemenko Perekonomian Raih Penghargaan Sistem Merit ASN dari KASN - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.* (n.d.). Retrieved October 26, 2021, from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/35/kemenko-perekonomian-raih-penghargaan-sistem-merit-asn-dari-kasn>
- Ketua KASN: Pak Gubernur Bilang Dia Profesional dan Saya Politis, Bukannya Terbalik?* (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/07/30/12451561/ketua-kasn-pak-gubernur-bilang-dia-profesional-dan-saya-politis-bukannya>
- Mohamad Guntur Romli - @aniesbaswedan anti transparansi Anies: Kenapa KASN Harus “Press Release”? Kan Bukan Partai, Bukan Ormas* <https://t.co/2qu0vORSwy> Ini @aniesbaswedan anti transparansi ya? Apalagi kasus ini menyita publik, & publik berhak tahu, bukannya. (n.d.). Retrieved November 5, 2021, from <https://m.facebook.com/GunRomli/posts/aniesbaswedan-anti-transparansianies-kenapa-kasn-harus-press-release-kan-bukan-p/10156875040175955/>

Rully Viersa Budiman, Sekar Puspita,  
Whitney Kenny Pangkey

- Pembubaran KASN: Serangan Balik dari Calo Jual Beli Jabatan?* (n.d.). Retrieved September 29, 2021, from <https://tirto.id/pembubaran-kasn-serangan-balik-dari-calo-jual-beli-jabatan-f9M9>
- Peroleh Nilai Tertinggi Sistem Meritokrasi KASN, Transformasi di Kementerian BUMN Berhasil - Ekonomi Bisnis.com.* (n.d.). Retrieved October 26, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211010/9/1452725/peroleh-nilai-tertinggi-sistem-meritokrasi-kasn-transformasi-di-kementerian-bumn-berhasil>
- Saling Tuding Anies dan Ketua KASN - News Liputan6.com.* (n.d.). Retrieved October 23, 2021, from <https://www.liputan6.com/news/read/3604983/saling-tuding-anies-dan-ketua-kasn>
- SWOT & PESTLE Analysis | LinkedIn.* (n.d.). Retrieved February 25, 2022, from <https://www.linkedin.com/pulse/swot-pestle-analysis-salman-cader-mscpm/>
- Sarbaugh, L. E. (1993). *Intercultural Communication*. USA: Library of Congress Catalog.
- Sendhikasari, D. D. (2018). *REKOMENDASI KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA ATAS PEROMBAKAN PEJABAT DI DKI JAKARTA. Vol. X, No, 4.*
- Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN, Gubernur Babel Lantik Pejabat yang Sempat Didemosi.* (n.d.). Retrieved October 24, 2021, from <https://kasn.go.id/id/publikasi/tindak-lanjuti-rekomendasi-kasn-gubernur-babel-lantik-pejabat-yang-sempat-didemosi>
- Wajong, M. A. P. (2019). TUGAS DAN WEWENANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. *ウイルス*, 52(1), 1–5.
- Watson, G. (2004). *The Legacy Of Ishikawa. Quality Progress* 37(4) , 54-47